

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara bagi untuk mengakses layanan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin (Saraswati dalam Suardi et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak warga untuk memperoleh pendidikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 menambahkan bahwa pendidikan dasar wajib diikuti seluruh warga, dengan penyelenggaraan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pembangunan, pendidikan berperan sebagai alat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung berbagai sektor kehidupan bernegara (Psacharopoulos & Woodhall, 1985).

Menurut Dewi et al. (dalam Saputri, 2021) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam mempersiapkan generasi unggul. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mendorong terbentuknya peradaban dan pola pikir masyarakat yang lebih maju. Di berbagai wilayah, pemerintah telah mengakui peran penting pendidikan menengah dalam menyediakan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan berpikir kritis yang penting bagi siswa untuk pertumbuhan pribadi dan kemajuan nasional (UNESCO, 2021).

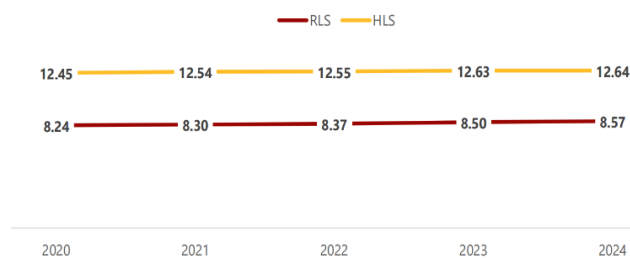
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan ini menjadi dasar pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun yang mencakup jenjang pendidikan menengah atas. Namun, implementasi kebijakan tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya optimal dan masih ditemui kendala, khususnya masih adanya anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dari negara-negara lainnya. Berdasarkan data Worldtop20.org tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-67 dari 209 negara dalam kualitas pendidikan. Posisi tersebut berada di antara Albania pada peringkat ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari berbagai persoalan, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik, belum meratanya sarana dan prasarana, kesenjangan sosial di lingkungan sekolah, serta tingginya biaya pendidikan. Faktor pembiayaan sering menjadi hambatan utama bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga memicu meningkatnya jumlah anak yang tidak bersekolah. Anak Tidak Sekolah (ATS) merujuk pada kelompok usia 7–18 tahun yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, atau belum pernah mengenyam pendidikan formal akibat faktor sosial ekonomi maupun kesiapan individu dalam mengikuti proses pembelajaran (Rinaldi et al., 2021).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan menunjukkan bahwa APK pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2024 masih tergolong rendah, yaitu sebesar 70,80 persen. Rendahnya partisipasi pendidikan pada tingkat

SLTA di wilayah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat, nilai budaya, keterbatasan daya tampung sekolah, serta lingkungan sekitar.

Gambar 1. 1 Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 1.1 menunjukkan Provinsi Sumatera Selatan masih perlu meningkatkan kualitas pendidikan, terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang baru mencapai 8,57 tahun, artinya sebagian besar penduduk dewasa (25 tahun ke atas) hanya menempuh pendidikan hingga kelas VIII atau IX SMP. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target wajib belajar 12 tahun. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,64 tahun menunjukkan bahwa anak-anak saat ini memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA/ sederajat atau bahkan perguruan tinggi.

Pendidikan gratis dipandang sebagai pendekatan yang mampu memberikan dampak nyata terhadap mobilitas sosial serta memperluas peluang ekonomi bagi individu maupun kelompok masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akibat kondisi ekonomi (Juni Sasmiharti, 2023). Tujuan utama kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan angka partisipasi, memastikan akses yang adil terhadap

pendidikan berkualitas, dan meningkatkan hasil pendidikan secara keseluruhan di negara tersebut (Chanimbe & Dankwah, 2021). Kebijakan ini juga untuk memastikan bahwa kendala keuangan tidak menghalangi akses ke pendidikan yang berkualitas, mempromosikan inklusivitas dan kesempatan yang sama untuk semua (Adu-Gyamfi & Anderson, 2021; Asante et al., 2022).

Penelitian oleh Ruff, dkk. menjelaskan bahwa kebijakan yang efektif dapat menjaga indikator penjaminan mutu dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan mobilitas sosial melalui pendidikan gratis. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Gerrard, et al. dimana dukungan pemerintah terhadap kegiatan pendidikan di sekolah negeri merupakan hal yang penting. Kebijakan *Free Senior High School*, yang diperkenalkan pada tahun 2017 oleh pemerintah Ghana, bertujuan untuk meningkatkan akses ke pendidikan menengah dengan menghilangkan hambatan finansial bagi semua siswa (Chanimbe & Dankwah, 2021). Layanan pendidikan gratis yang disediakan pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan kebahagiaan keluarga (Jin & Liu, 2023). dengan menyediakan pendidikan gratis, pemerintah membantu memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga dengan lebih baik kebutuhan pendidikan keluarga tanpa menambah beban keuangan, sehingga meningkatkan kebahagiaan keluarga (French & Vigne, 2019).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan melalui pendirian sekolah berasrama bertaraf internasional, yaitu SMAN Sumatera Selatan yang sebelumnya dikenal sebagai Sampoerna Academy. Sekolah ini didirikan pada tahun 2009 melalui kolaborasi

antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Putera Sampoerna Foundation untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan berkualitas bertaraf internasional, terutama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga pra-sejahtera.

SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan menengah bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program pendidikan gratis dirancang sebagai kebijakan strategis untuk menjawab dua tantangan utama daerah, yaitu belum optimalnya kualitas layanan pendidikan dan tingginya angka kemiskinan. Kebijakan ini sejalan dengan Misi pertama Gubernur Sumatera Selatan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompetitif. Program pendidikan gratis ditetapkan sebagai salah satu dari dua belas program prioritas daerah, khususnya sebagai program strategis keempat dalam agenda pendidikan gratis yang berkeadilan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan (SMAN Sumatera Selatan). Regulasi ini mengatur sistem pengelolaan sekolah, mekanisme pembiayaan, serta tujuan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada perluasan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, khususnya peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu. Agar penyelenggaraan SMAN Sumatera Selatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan inovatif, dipandang perlu untuk menyusun Statuta atau Anggaran Dasar sebagai landasan operasional. Oleh karena

itu, Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai dasar hukum yang mengatur hal tersebut

Dilansir dari laman smansumsel.sch.id, SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan salah satu sekolah unggul yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan berbasis asrama (*boarding school*). Sekolah ini dikenal luas sebagai salah satu SMA terbaik di wilayah Sumatera Selatan karena konsistensinya dalam mencetak prestasi akademik maupun nonakademik pada tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Keunggulan tersebut tidak terlepas dari dukungan sistem pembelajaran yang terintegrasi, pengelolaan sekolah yang profesional, serta komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Rincian prestasi SMA Negeri Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. 1 Prestasi SMA Negeri Sumatera Selatan

| No | Prestasi | Tingkat |
|-----------|--|----------------|
| 1. | Bridge GEDSI School Model Australia-Indonesia | Internasional |
| 2. | Peringkat 119 Nasional nilai UTBK Tertinggi se-Indonesia | Nasional |
| 3. | Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kemendikbudristek | Nasional |
| 4. | Penerima Penghargaan Apresiasi TERBAIK Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI | Nasional |
| 5. | Sekolah Teraktif Tantangan Sepekan Satu Buku-Perpustakaan Nasional | Nasional |
| 6. | Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan XIII, DITJEN GTK Kemendikbud RI | Nasional |
| 7. | Juara 1 Best School Appreciation oleh Astra Honda Motor | Nasional |
| 8. | Juara II Lomba Perpustakaan Terbaik | Provinsi |
| 9. | Juara 1 Lomba Optimalisasi Teknologi sebagai Upaya menuju Digitalisasi Pendidikan oleh PT. Quipper Edukasi Indonesia | Provinsi |

Sumber: Instagram @smansumsel

Secara khusus, pada tahun 2022 SMA Negeri Sumatera Selatan berhasil menempati peringkat ke-119 secara nasional dalam perolehan nilai UTBK tertinggi se-Indonesia dan masuk dalam daftar Top 1000 sekolah terbaik nasional berdasarkan hasil UTBK tahun 2022 (Kompas.com, 2023). Selain capaian akademik tersebut, SMA Negeri Sumatera Selatan juga dipercaya sebagai Sekolah Penggerak Angkatan 2 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta terpilih sebagai bagian dari program *Bridge GEDSI School Model Australia–Indonesia*. Pencapaian ini menunjukkan peran strategis SMA Negeri Sumatera Selatan sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan praktik pendidikan inovatif dan berwawasan global.

SMA Negeri Sumatera Selatan beroperasi berdasarkan Izin Operasional Nomor 067/1630.a/PM/Disdik.SS/2009. Melalui kebijakan tersebut, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa di wilayah Sumatera Selatan untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas secara gratis melalui skema beasiswa penuh. Fasilitas yang diberikan mencakup pembiayaan pendidikan, tempat tinggal di asrama, konsumsi, buku pelajaran, serta layanan kesehatan. Program beasiswa selama tiga tahun ini memberikan peluang bagi siswa berpotensi untuk menempuh pendidikan pada jenjang SMA tanpa kendala biaya sehingga terbukanya kesempatan mengembangkan diri dan meraih prestasi sehingga mampu merubah nasib keluarganya.

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan adanya tren penurunan persentase penduduk miskin secara konsisten, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan masih berada di atas 12 persen, namun secara bertahap mengalami penurunan hingga mencapai 10,51 persen pada September 2024, sekaligus melampaui target pembangunan daerah tahun 2024 sebesar 10,95 persen. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam menekan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat, salah satunya melalui sektor pendidikan. Dalam konteks ini, Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan berperan sebagai instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui peningkatan akses pendidikan menengah yang merata dan berkeadilan. Dengan menurunkan beban biaya pendidikan rumah tangga, kebijakan ini tidak hanya mendorong peningkatan partisipasi sekolah, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, SMA Negeri Sumatera Selatan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional Cambridge.

Integrasi kurikulum membuat peserta didik mengikuti asesmen nasional sekaligus mengikuti ujian internasional dari Universitas Cambridge. Selain itu, sekolah ini berfungsi sebagai pusat pelaksanaan Cambridge International Examination (CIE), sehingga memberikan akses langsung bagi siswa untuk memperoleh sertifikasi bertaraf global.

Selain menekankan akademik, sekolah ini juga membina karakter kepemimpinan, kemandirian, kreativitas, kewirausahaan, serta kepedulian sosial melalui berbagai program ekstrakurikuler, pertukaran pelajar, dan kegiatan pengabdian Masyarakat. Sekolah ini menerapkan Pendidikan Asrama 3 Tahun, yang memberikan lingkungan belajar kondusif dan membentuk karakter siswa melalui kedisiplinan, kemandirian, serta kebersamaan dalam kehidupan asrama. Dengan sistem ini, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik yang berkualitas tetapi juga pembinaan karakter yang kuat.

SMAN Sumatera Selatan menanamkan konsep *Life-Long Learning*, yakni budaya belajar sepanjang hayat yang mendorong siswa untuk terus berkembang, beradaptasi, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman. Sebagai Sekolah Penggerak, sekolah ini turut berperan aktif dalam inovasi pendidikan dengan menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengembangkan kompetensi abad ke-21, serta membangun karakter yang berdaya saing. Dengan kombinasi program-program unggulan ini, SMAN Sumatera Selatan berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan kepemimpinan yang kuat.

Setiap tahun, SMA Negeri Sumatera Selatan membuka kesempatan bagi lulusan SMP/MTs berprestasi untuk mengikuti proses seleksi penerimaan peserta didik baru. Bagi calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi, diberikan bantuan pendidikan secara menyeluruh yang mencakup pembiayaan akademik, penyediaan fasilitas pembelajaran, tempat tinggal di asrama, serta dukungan layanan kesehatan selama menjalani masa pendidikan di SMA Negeri Sumatera Selatan.

Tabel 1. 2 Total Siswa SMA Negeri Sumatera Selatan

| Tahun | Kuota Siswa |
|--------------|--------------------|
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 115 |
| 2024 | 120 |
| 2025 | 125 |

Sumber: Website PPDB SMAN Sumsel diakses pada Juni 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.2 terlihat bahwa kuota siswa SMA Negeri Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun jumlah pendaftar fluktuatif. Peningkatan kuota ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memajukan pendidikan, terutama bagi siswa berprestasi dan keluarga pra-sejahtera. Setiap tahun SMA Negeri Sumatera Selatan selalu membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bisa diikuti oleh siswa-siswa kelas IX SMP dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi dan berasal dari keluarga pra-sejahtera untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di SMA Negeri Sumatera Selatan. Peningkatan kuota PPDB

SMA Negeri Sumatera Selatan adalah bukti nyata kepedulian pemerintah provinsi terhadap pendidikan inklusif dan berkualitas. Tingginya minat masyarakat terhadap SMA Negeri Sumatera Selatan juga menunjukkan bahwa program pendidikan gratis yang diselenggarakan sekolah tersebut memperoleh kepercayaan publik dan dianggap mampu menyediakan layanan pendidikan berkualitas.

Program Pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan menetapkan serangkaian persyaratan ketat untuk memastikan bahwa calon peserta yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria akademik, sosial-ekonomi, dan kemampuan bahasa. Pertama, persyaratan usia dan kewarganegaraan mengharuskan peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 14–16 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di kelas 9 SMP/MTs di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Batasan usia ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta berada pada jenjang pendidikan yang sesuai sebelum memasuki SMA.

Kedua, dari sisi akademik, peserta harus memiliki nilai rata-rata minimal 82,00 pada empat mata pelajaran inti (Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA) dari semester 1 hingga 5, serta berada di peringkat 5 besar kelas secara konsisten. Selain itu, peserta wajib melampirkan sertifikat prestasi akademik maupun non-akademik dari tingkat kota hingga internasional, untuk menyeleksi siswa yang unggul secara akademis sekaligus memiliki kemampuan tambahan di luar kelas.

Ketiga, aspek sosial-ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam seleksi. Peserta harus berasal dari keluarga pra-sejahtera, dengan bukti

bahwa penghasilan kotor orang tua tidak melebihi Rp3.000.000 per bulan. Dokumen pendukung yang diperlukan meliputi slip gaji (jika orang tua bekerja formal), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh lurah setempat. Selain itu, pendidikan formal orang tua (ayah/ibu) tidak boleh melebihi jenjang S-1, dan tidak boleh menduduki jabatan struktural setingkat kepala seksi/bidang di instansi mana pun. Persyaratan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa calon peserta tidak boleh memiliki saudara kandung atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sedang atau pernah bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan. Untuk memverifikasi kondisi tempat tinggal, peserta juga wajib melampirkan foto rumah sebagai bagian dari dokumen pendaftaran.

Keempat, kemampuan berbahasa Inggris secara aktif, baik lisan maupun tulisan, menjadi syarat tambahan yang harus dipenuhi. Kemampuan ini dinilai melalui tes atau wawancara sebagai bagian dari proses seleksi, mengingat pentingnya penguasaan bahasa asing dalam pendidikan global. Persyaratan ini dirancang untuk menjaring siswa yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik tinggi, tetapi juga berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, sehingga bantuan beasiswa dapat tepat sasaran. Program ini bertujuan memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan finansial, sekaligus memastikan bahwa penerima beasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran yang kompetitif di SMA Negeri Sumatera Selatan.

berikutnya. Peserta yang lolos diwajibkan mengirimkan berkas dan mengikuti proses verifikasi dokumen.

Selanjutnya, mereka akan menjalani tahap wawancara guna menilai motivasi serta kesiapan mereka dalam mengikuti pendidikan di SMAN Sumatera Selatan. Selain itu, dilakukan juga home visit sebagai bagian dari verifikasi kondisi lingkungan calon murid. Setelah semua tahapan tersebut selesai, pengumuman akhir akan dilakukan untuk menentukan peserta yang resmi diterima sebagai murid baru di SMAN Sumatera Selatan.

Adanya keunggulan serta keberhasilan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan berhasil meraih berbagai penghargaan baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional, Penghargaan yang diraih oleh SMA Negeri Sumatera Selatan, antara lain:

Tabel 1. 3 Prestasi Siswa Tingkat Internasional

| Bidang Lomba | Nama Lomba | Tanggal Pelaksanaan | Peraih |
|---------------------|---|----------------------------|---|
| Exchange | Student Exchange Singapore Management University | 14 Januari 2025 | Dato' Kho Hui Meng Young Scholarship Program |
| Robotik | Universal Robots Academy, PT Handal Yesindo Sejahtera, Beasiswa Indonesia Maju & Puspresnas | 4 Agustus 2024 | Award of CB3 International Certificate of Universal Robots |
| Robotik | Universal Robots Academy, PT Handal Yesindo Sejahtera, Beasiswa Indonesia Maju & Puspresnas | 4 Agustus 2024 | Award of E-Series Pro Track International Certificate of Universal Robots |

| | | | |
|------------------------|---|------------------|---|
| Robotik | Universal Robots Academy, PT Handal Yesindo Sejahtera, Beasiswa Indonesia Maju & Puspresnas | 4 Agustus 2024 | Award of E-Series Application Track International Certificate of Universal Robots |
| Robotik | Universal Robots Academy, PT Handal Yesindo Sejahtera, Beasiswa Indonesia Maju & Puspresnas | 4 Agustus 2024 | Award of E-Series Core Track International Certificate of Universal Robots |
| Physics | Sir Isaac Newton Exam by University Waterloo | Juni 2024 | 6th In Indonesia and Best 25% In The World Out 3077 Participant |
| Olimpiade | Olimpiade Sains Nasional Bidang Astronomi | 12 Oktober 2025 | Bronze Medal |
| Essay | Commonwealth Essay Competition | 3 Oktober 2023 | Bronze Award |
| Essay Renewable Energy | ASEAN Energy Youth Award 2023 | 30 Juli 2023 | Runner Up |
| Karya Tulis Ilmiah | Vilnius International Project Olympiad by Vinus University | 15 Mei 2023 | Gold Medal |
| Essay | Upstrack 5.0 by Pertamina University | 29 April 2023 | First and Second Rank |
| Mathematics | World Mathematics Invitational 2023 by Royal Islamic School | 1 April 2023 | Bronze Medal |
| Mathematics | Cayley Contest 2023 (Mathematics) by University of Waterloo | 22 Februari 2023 | Silver Medal |

Sumber: Dokumen Prestasi Siswa SMA Negeri Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 Siswa-siswi SMAN Sumatera Selatan (SMAN Sumsel) yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah terus membuktikan keunggulannya di kancah kompetisi Nasional maupun Internasional. Berbagai

capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan tidak hanya berhasil memperluas akses pendidikan, tetapi juga mampu menghasilkan kualitas lulusan yang kompetitif.

SMAN Sumsel terus membuktikan bahwa dengan dukungan finansial dan pembinaan intensif, siswa mampu bersaing di panggung global. Selama 15 tahun sejak berdirinya pada tahun 2009 hingga 2024, SMA Negeri Sumatera Selatan telah membuktikan komitmennya dalam mencetak lulusan berkualitas dengan keberhasilan lebih dari 1.300 alumni yang melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun luar negeri. Prestasi ini tidak lepas dari penerapan *Pathway to University Program*, sebuah program strategis yang dirancang khusus untuk mempersiapkan siswa menuju jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Gambar 1. 4 Sebaran Jenis Perguruan Tinggi Alumni



Sumber: SMA Negeri Sumatera Selatan, 2025

Dari Gambar 1.5 program *Pathway to University* menunjukkan SMA Negeri Sumatera Selatan berhasil membimbing siswa-siswinya untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai jenis perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, sesuai data yang tercatat pada periode 2020-2024. Program ini dimulai sejak kelas

X dengan pengembangan minat karir melalui berbagai kegiatan eksplorasi bidang akademik dan non-akademik, yang bertujuan membantu murid mengenali potensi diri serta menentukan arah studi yang sesuai.

Tabel 1. 4 Data Sebaran Alumni

| No | Keterangan | TAHUN LULUS | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | PERGURUAN TINGGI NEGERI | 63 | 61 | 66 | 79 | 79 |
| 2 | PERGURUAN TINGGI SWASTA | 31 | 37 | 29 | 17 | 16 |
| 3 | MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR NEGERI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | SEKOLAH KEDINASAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | PESANTREN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUMLAH ALUMNI | | 101 | 101 | 99 | 100 | 100 |
| JUMLAH MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI | | 100 | 99 | 99 | 96 | 99 |
| LANJUT KULIAH DENGAN BEASISWA | | 96 | 97 | 97 | 95 | 95 |
| LANJUT KULIAH TANPA BEASISWA | | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| LANJUT BEKERJA/GAPYEAR | | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |

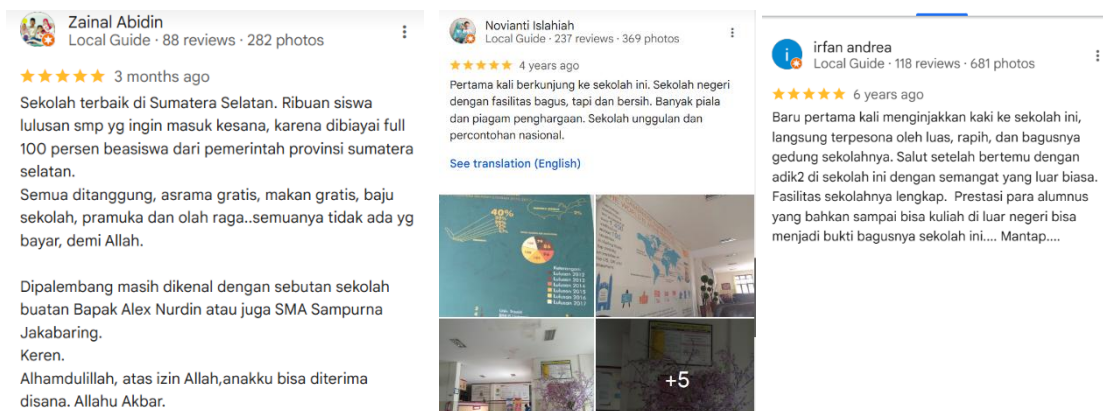
Sumber: SMA Negeri Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 1.4 sebagian besar dari Siswa SMAN Sumatera Selatan meraih kesempatan kuliah dengan beasiswa penuh, baik melalui jalur undangan (seleksi prestasi non-tes) maupun tes tertulis yang kompetitif. Keberhasilan para alumni ini tidak lepas dari kualitas pendidikan, pembinaan intensif, dan dukungan sistem yang diterapkan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Tingginya jumlah alumni yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menunjukkan bahwa program pendidikan gratis tidak hanya meningkatkan akses pendidikan menengah, tetapi juga membuka peluang bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas.

SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan wujud investasi pemerintah provinsi dalam sektor pendidikan. Investasi pada pendidikan berkualitas diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,

pengembangan kapasitas individu, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat (Nurfatihah et al., 2022). Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat, terpenuhinya hak atas pendidikan, serta optimalisasi pelaksanaan program wajib belajar (Sadubun et al., 2022).

Gambar 1. 5 Respon Masyarakat



Sumber: *Google Review SMA Negeri Sumatera Selatan*

Dilihat dari Gambar 1.6 Penyelenggaraan program sekolah gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan mendapatkan respon positif dari masyarakat karena membuka peluang bagi masyarakat kelas bawah agar dapat merasakan pendidikan yang berkualitas. Tanggapan masyarakat terhadap SMA Negeri Sumatera Selatan secara umum positif dan mendukung. Sekolah ini dikenal dengan visi menjadi pencetak pemimpin masa depan yang kompeten, berkarakter, dan berwawasan global. Masyarakat mengapresiasi misi sekolah yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera serta menanamkan jiwa kepemimpinan, akhlak mulia, dan karakter yang kuat kepada siswanya.

Program tersebut telah membawa banyak manfaat kepada masyarakat, terkhusus Masyarakat Sumatera Selatan. Manfaat tersebut antara lain adalah

peningkatan kualitas pembangunan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, peningkatan akses ke layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pengajar (Wahyuni, 2021).

Keberadaan program pendidikan gratis memberikan kontribusi nyata dalam meringankan beban orang tua peserta didik, khususnya mereka yang berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Melalui pelaksanaan program tersebut, pemerintah berupaya memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan formal mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai variabel yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam proses implementasinya.

Thomas R. Dye, sebagaimana dikemukakan dalam *Islamy* (2009:19), mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala bentuk pilihan pemerintah untuk bertindak ataupun tidak bertindak. Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik tidak berhenti pada wacana atau pernyataan normatif semata, melainkan terwujud dalam keputusan konkret yang memiliki implikasi nyata bagi masyarakat. Bahkan keputusan untuk tidak bertindak pun tetap dikategorikan sebagai kebijakan publik karena memiliki konsekuensi yang setara dengan tindakan yang diambil. Sementara itu, William N. Dunn mengemukakan bahwa kebijakan publik melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan.

Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai kiat-kiat atau praktik terbaik (*best practice*). Keberhasilan sekolah ini dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera serta berbagai capaian prestasi yang diraih menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung yang berperan dalam implementasi program tersebut dan praktik baik (*best practice*). *Best practice* merupakan bentuk inovasi yang dirancang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghasilkan perubahan positif. Menurut Elo & Mutiarin (dalam Megawati, 2021) pengertian *best practice* masih sangat minim, karena *best practice* sendiri hanya sekedar predikat indikator penting dan tidak bisa digeneralisasikan ke semua aspek yang sudah ada. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor pendukung implementasi program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan sebagai *best practice*, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lain (*lesson learned*) melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis *Best Practice* pada Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan”**

1.2 Identifikasi Keberhasilan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sejumlah identifikasi keberhasilan dalam penelitian sebagai berikut:

1. SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan sekolah terbaik dan unggul di Sumatera Selatan yang memiliki prestasi tingkat Nasional maupun Internasional, seperti berhasil masuk dalam Top 1000 sekolah terbaik di Indonesia (peringkat 119 nasional pada UTBK 2022) dan terpilih sebagai

sekolah penggerak Kemendikbud dan Bridge GEDSI School Model Australia-Indonesia.

2. SMA Negeri Sumatera Selatan menyediakan pendidikan menengah berkualitas secara gratis, khususnya bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera.
3. Seluruh siswa memperoleh beasiswa 3 tahun penuh yang mencakup seragam, buku, alat tulis, akomodasi, dan fasilitas asrama, didanai oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan donor.
4. Sekolah memadukan kurikulum standar nasional dan internasional, mendukung siswa untuk unggul secara akademik dan siap bersaing di tingkat global.
5. SMAN Sumatera Selatan telah berhasil membuktikan prestasi di berbagai level kompetisi, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional.
6. Selama SMA Negeri Sumatera Selatan didirikan dari 2009 sampai saat ini 2024 sudah ada sekitar 1.300 alumni yang telah berhasil untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri, luar negeri, swasta, kedinasan melalui jalur prestasi maupun tes tertulis dengan beasiswa penuh.

1.3 Perumusan Penelitian

Berdasarkan hasil identifikasi penelitian, peneliti menyusun rumusan penelitian yang dirancang dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan ditinjau dari aspek *best practice*?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis program pendidikan gratis ditinjau dari aspek *best practice*.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang *best practice* dan aktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis di SMAN Sumatera Selatan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan akademik terkait penerapan implementasi kebijakan pendidikan yang sesuai dengan tujuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1) Memberikan pandangan baru sehubungan dengan implementasi program pendidikan gratis di SMAN Sumatera Selatan dalam aspek *best practice*. Informasi yang diperoleh dapat mengubah atau memperdalam pemahaman mereka terkait implementasi program yang diterapkan.

2) Memberikan gambaran dan deskripsi menyeluruh kepada pihak akademisi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis SMAN Sumatera Selatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai peningkatan program.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan Program Pendidikan Gratis dan *Best Practice* Implementasi Kebijakan.

Penelitian Lidda, M. A. A., Tajuddin, M. S., dan Irfan (2022) menelaah Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Malunda, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan implementasi program dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung meliputi aspek regulasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan komitmen para aktor yang terlibat, sedangkan hambatan yang ditemukan berkaitan dengan keterlambatan distribusi anggaran serta lemahnya pengawasan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa program mampu mengeliminasi sebagian besar biaya pendidikan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, meskipun beberapa kebutuhan seperti seragam tertentu masih menjadi tanggungan sekolah. Selain itu, tersedia bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Selanjutnya, PH, F. S., dan Gistituati, N. (2023) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kota Padang Sidempuan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi kebijakan, mengukur efektivitasnya, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi capaian program. Analisis didasarkan pada model implementasi Edward III (1980) yang menekankan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan metode deskriptif kualitatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dirancang dengan tujuan yang progresif, pelaksanaannya masih menghadapi

kendala, terutama dalam aspek koordinasi teknis dan administratif antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Penelitian oleh Agus, H., Isjnoni, I., dan Azhar mengkaji implementasi kebijakan sekolah gratis di SMP IT Madani Pekanbaru. Studi ini juga menggunakan kerangka Edward III untuk menganalisis faktor penentu keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan gratis dapat berjalan efektif melalui dukungan dana BOS, kontribusi yayasan dan donatur, serta dukungan pemerintah daerah. Optimalisasi sumber daya dilakukan melalui strategi pengajaran lintas bidang dan pemanfaatan fasilitas sekolah secara inovatif.

Huda, G. R. N. (2023) meneliti implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Malang dengan fokus pada peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis memadukan model Edward III dan pendekatan Grindle yang menyoroti aspek isi serta konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya formulasi skema baru agar kebijakan lebih berkeadilan bagi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.

Sementara itu, Munawaroh, N. (2022) mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis pada jenjang SMP di Kabupaten Bandung. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis berbasis teori Edward III, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, terutama dalam pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi siswa.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan studi ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berfokus pada

implementasi program pendidikan gratis. Penelitian ini mengacu pada konsep *best practice* menurut Prasojo yang meliputi dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transferabilitas serta menggunakan teori terkait faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan dari George Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor pendukung program pendidikan gratis yang ditinjau dalam konsep *best practice*. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian adalah SMAN Sumatera Selatan. Alasan dipilih di SMA Negeri Sumatera Selatan karena merupakan lembaga pendidikan yang menjadi inisiatif pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk mengentaskan kemiskinan struktural melalui program pendidikan gratis yang memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi yang berasal dari keluarga pra-sejahtera untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan kebaruan yaitu menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan gratis berhasil berdasarkan konsep *best practice*.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Tabel Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti-Tahun-Judul | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|------------------------|---|
| 1. | Rolos, M.C., Posumah, J., & Londa, V (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara. | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait program pendidikan gratis bagi siswa Sekolah Dasar dijalankan di Kabupaten Minahasa Tenggara. | Edwards III (Pioh dan Londa, 2016) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: a) Struktur birokrasi (<i>bureaucratic structure</i>) b) Sumber daya (<i>resources</i>) c) Sikap pelaksana (<i>disposition</i>) d) Komunikasi (<i>communication</i>) Charles O. Jones dalam Pioh dan Londa (2016: 77) pilar dalam implementasi kebijakan yaitu: Organisasi (<i>organization</i>), Penafsiran (<i>interpretation</i>), Penerapan (<i>application</i>) | Kualitatif eksploratif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara telah berjalan melalui aspek organisasi, interpretasi, dan pelaksanaan. Namun, masih diperlukan perbaikan, terutama dalam penambahan tenaga guru, penguatan pengawasan, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta evaluasi bantuan siswa miskin agar tidak tumpang tindih dengan PKH Pendidikan. |

| No | Nama Peneliti-Tahun-Judul | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|-----------------------|---|
| 2. | Aiska, I. S. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kota Blitar (Studi Implementasi Perwali No 8 Tahun 2015 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun) | Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Blitar dengan meninjau faktor pendukung dan penghambat berdasarkan Perwali Nomor 8 Tahun 2015 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun. | Faktor implementasi kebijakan menurut model Edward III (1980) meliputi komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Sementara itu, model Van Meter dan Van Horn menekankan beberapa variabel penting, yaitu sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. | Deskriptif kualitatif | Implementasi kebijakan tersebut telah berlangsung secara efektif sehingga mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat Kota Blitar. Proses implementasinya dapat dipahami oleh para pelaksana dan diterima oleh masyarakat. Meskipun demikian, masih muncul beberapa konsekuensi, seperti peningkatan beban kerja, penurunan motivasi belajar, serta munculnya persoalan sosial di kalangan siswa. |

| No | Nama Peneliti-Tahun-Judul | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|------------------------|---|
| 3. | Lidda, M. A. A., Tajuddin, M. S., & Irfan, I. (2022). Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malunda (Smpn4 Malunda) Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi program pendidikan gratis di SMPN 4 Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene | <p>Faktor Pendukung Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kerangka regulasi b) Keterlibatan para pemangku kepentingan c) Komitmen dari para stakeholder <p>Faktor Penghambat Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyaluran anggaran yang tidak tepat waktu b) Pengawasan yang belum maksimal | Kualitatif deskriptif. | Implementasi Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Malunda, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene menghapus pungutan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran. Meski demikian, beberapa biaya tertentu masih tetap diberlakukan, seperti pengadaan seragam batik dan pakaian olahraga yang termasuk dalam komponen Biaya Operasional Sekolah. Di samping itu, program ini turut memberikan bantuan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. |

| No | Nama Peneliti-Tahun-Judul | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|------------------------|---|
| 4. | PH, F. S., & Gistituati, N. (2023). Evaluasi implementasi program pendidikan gratis di kota Padang Sidempuan. | Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi program pendidikan gratis, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaannya | Model implementasi Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi serta kriteria evaluasi kebijakan Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan | Kualitatif Deskriptif | Program pendidikan gratis telah dirancang secara baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan koordinasi antar pemerintah daerah, baik secara teknis maupun administratif |
| 5. | Huda, G. R. N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Malang: (Studi kasus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang). | Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan gratis beserta faktor pendukung dan penghambatnya. | Model Edward III dan model Grindle yang menitikberatkan pada isi dan konteks kebijakan | Deskriptif kualitatif. | Implementasi kebijakan memerlukan pembaruan skema agar tercipta keadilan bagi peserta didik dari berbagai latar belakang ekonomi |

| No | Nama Peneliti-Tahun-Judul | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 6. | Ridho, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan (Studi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan). | Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya | Teori Sabatier: kejelasan tujuan, dukungan teori, dasar hukum, komitmen pelaksana, dukungan stakeholder, stabilitas sosial-ekonomi-politik. | Kualitatif pendekatan studi kasus | Implementasi berjalan cukup baik dengan capaian sekitar 78,5%. Faktor pendukung meliputi kejelasan kebijakan, dasar hukum, komitmen pelaksana, dukungan stakeholder, serta stabilitas lingkungan. Hambatan utama terletak pada lemahnya landasan teoritis. |
| 7. | Munawaroh, N. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah Menengah Pertama Oleh Dinas Pendidikan Di Kabupaten Bandung. | Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan gratis beserta kendala dan solusinya | Model Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi | Kualitatif | Program belum sepenuhnya memenuhi seluruh indikator praktik terbaik karena masih terdapat aspek yang belum optimal. |

| No | Nama Peneliti-Tahun-Judul | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|-----------------------|--|
| 8. | Noviyanti; Masnia Ahmad (2023). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. | Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi pelayanan publik melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. | Teori best practice oleh (Prasojo dalam Noviyanti, 2023), <i>Best practice</i> dianalisis menggunakan 3 kriteria berupa dampak (<i>impact</i>), kemitraan (<i>partnership</i>), keberlanjutan (<i>sustainability</i>). | Kualitatif | Indikator dampak (<i>impact</i>) dan kemitraan (<i>partnership</i>) telah berjalan optimal. Namun, indikator keberlanjutan (<i>sustainability</i>) belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam layanan MPaspor, seperti gangguan jaringan dan sistem yang sering mengalami <i>error</i> akibat tingginya jumlah pengguna yang mengakses secara bersamaan. |
| 9. | Listyaningsih Dewi Pamungkas; Rukhana Fitriati (2019). <i>Best practice</i> Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kudus | Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik terbaik inovasi pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus. | Teori best practice (Prasojo dalam Listyaningsih, 2019): <i>Best practice</i> dianalisis menggunakan 5 kriteria berupa dampak (<i>impact</i>), kemitraan (<i>partnership</i>), keberlanjutan (<i>sustainability</i>), kepemimpinan, dan inovasi yang dapat ditransfer, | Deskriptif kualitatif | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dikategorikan baik dan layak sebagai “Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik” bagi daerah lain |

| No | Nama Peneliti-Tahun-Judul | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|-----------------------|--|
| 10. | Kurniani Wismaningsih; Retno Sunu Astuti; Ida Hayu Dwimawanti; Budi Puspo Priyadi; Teuku Afrizal (2020). <i>Best practice</i> Inovasi Pelayanan Publik “Laboratorium Kemiskinan” di Kabupaten Pekalongan | Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan inovasi pelayanan publik “Laboratorium Kemiskinan” di Kabupaten Pekalongan. | Teori best practice oleh (Prasojo dalam Wismaningsih, dkk), Best practice dianalisis menggunakan 5 kriteria berupa dampak (<i>impact</i>), kemitraan (<i>partnership</i>), keberlanjutan (<i>sustainability</i>), kepemimpinan, dan inovasi yang dapat ditransfer. | Deskriptif kualitatif | Laboratorium Kemiskinan sudah memenuhi kriteria <i>best practice</i> sehingga dua dari tiga desa telah keluar dari kategori desa merah. Inovasi ini juga berhasil meraih TOP 45 Inovasi dalam ajang KIPP 2020. |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

1.7.2 Administrasi Publik

Administrasi publik, sebagaimana dikemukakan oleh Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2010:7), adalah proses terencana dalam mengorganisasi sumber daya dan aparatur publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan. Administrasi publik bukan sekadar aspek teknis, tetapi juga memadukan seni dan ilmu untuk mengatur kepentingan umum serta melaksanakan tugas yang ditetapkan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Nigro & Nigro menyatakan bahwa administrasi publik mencakup aktivitas kerja sama kolektif dalam ranah publik, di mana lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif memiliki peran strategis dalam proses perumusan kebijakan publik.

Administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik, memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dari administrasi sektor swasta, serta menjalin keterkaitan erat dengan kelompok swasta dan individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Definisi ini menekankan dimensi kelembagaan dengan menempatkan kerja sama kelompok sebagai ciri utama aktivitas publik yang membedakannya dari kegiatan non-publik. Selain itu, tujuan administrasi publik diarahkan untuk mendorong kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, administrasi publik berupaya mengembangkan pola manajemen yang mengutamakan efektivitas, efisiensi, serta peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan publik. Oleh karena itu, administrasi publik dapat dipahami sebagai integrasi antara pendekatan teoretis dan penerapan praktis dalam proses manajerial yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai normatif

dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangannya, paradigma administrasi publik mengalami transformasi yang ditandai dengan enam paradigma utama yang meliputi:

Paradigma 1: Dikotomi Politik/Administrasi, 1900-1926

Paradigma ini berkembang seiring dengan diterbitkannya karya Frank J. Goodnow pada tahun 1900 serta Leonard D. White pada tahun 1926. Melalui bukunya *Politics and Administration*, Goodnow mengemukakan pandangan bahwa negara beserta perangkatnya menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik berkaitan dengan proses perumusan kebijakan sebagai wujud kehendak negara, sedangkan fungsi administrasi berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Ciri utama paradigma ini terletak pada upaya pemisahan yang tegas antara peran politisi dan administrator dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam kerangka ini, kajian ilmu politik dibatasi pada persoalan politik, pemerintahan, serta kebijakan publik, sementara administrasi publik mencakup aspek organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan penganggaran dalam sistem birokrasi pemerintahan. Penerapan paradigma tersebut tercermin dalam struktur pemerintahan yang membedakan secara jelas antara ranah eksekutif sebagai pemegang fungsi politik dan birokrasi sebagai pelaksana fungsi administratif, di mana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi 1927-1937

Paradigma kedua dalam administrasi publik berkembang seiring dengan diterbitkannya buku teks penting karya Willoughby berjudul *Principles of Public Administration* pada tahun 1927. Karya tersebut menegaskan bahwa administrasi memiliki seperangkat prinsip ilmiah yang bersifat objektif, dapat diidentifikasi secara sistematis, serta dapat dipelajari dan diterapkan oleh para administrator untuk meningkatkan profesionalisme dan keahlian dalam menjalankan tugasnya. Paradigma ini menitikberatkan perhatian pada upaya merumuskan prinsip-prinsip administrasi negara sebagai landasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam kerangka ini, Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick merumuskan prinsip-prinsip administrasi yang dikenal dengan akronim POSDCORB, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyediaan pegawai, pengarahan, pengoordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Prinsip-prinsip tersebut dipandang bersifat universal karena dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Fokus utama paradigma ini terletak pada penguatan kompetensi inti administrasi publik melalui penguasaan prinsip-prinsip administrasi, dengan orientasi yang kuat pada pengembangan teori dan teknik administrasi, manajemen modern, politik ekonomi, serta proses perumusan kebijakan, analisis kebijakan, dan metode evaluasi terhadap hasil kebijakan publik.

Tantangan: 1938-1950

Pada tahun 1938, perkembangan administrasi publik menghadapi tantangan konseptual yang penting seiring dengan diterbitkannya karya Chester I. Barnard berjudul *The Functions of the Executive*. Meskipun pada awal kemunculannya buku tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kajian administrasi publik, pemikirannya kemudian memberikan kontribusi besar dalam membentuk gagasan Herbert A. Simon yang tertuang dalam karyanya *Administrative Behavior*. Memasuki dekade 1940-an, dinamika pemikiran dalam administrasi publik semakin berkembang dan mengkristal ke dalam dua arus pemikiran utama yang saling memperkuat. Perdebatan pertama berfokus pada keabsahan pemisahan antara ranah politik dan administrasi, sedangkan perdebatan kedua mempertanyakan konsistensi serta universalitas prinsip-prinsip administrasi. Salah satu karya awal yang secara tegas menantang pandangan mengenai pemisahan politik dan administrasi adalah buku *Elements of Public Administration* yang disunting oleh Fritz Morstein Marx pada tahun 1946, yang menghimpun berbagai tulisan kritis terhadap paradigma sebelumnya.

Reaksi terhadap Tantangan: 1947-1950

Periode antara tahun 1947 hingga 1950 menandai fase penting dalam perkembangan administrasi publik yang ditandai oleh beragam respons dari para pakar administrasi negara. Pada masa tersebut, seiring dengan kritik Herbert A. Simon terhadap fondasi klasik administrasi publik melalui karyanya *Administrative Behavior*, ia juga menawarkan pendekatan alternatif yang dituangkan dalam

esainya berjudul A Comment on “The Science of Public Administration” yang dimuat dalam Public Administration Review. Simon berpendapat bahwa paradigma baru dalam administrasi negara seharusnya didukung oleh keberadaan dua tipe keahlian administrator publik yang berbeda. Selanjutnya, dalam periode paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956–1970), pendekatan ilmiah melalui pengembangan teori organisasi dan teknik-teknik manajemen mulai diintegrasikan secara sistematis ke dalam disiplin ini. Perubahan locus dan fokus kajian menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menegaskan identitas administrasi publik sebagai suatu bidang ilmu yang mandiri. Dinamika perbedaan gagasan dan argumentasi yang muncul dalam setiap perdebatan administrasi publik tersebut pada akhirnya berimplikasi pada semakin beragamnya pendekatan dan pemikiran dalam ranah keilmuan administrasi publik..

Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik Ilmu Pengetahuan, 1950-1970

Paradigma ini berkembang sebagai respons atas kritik terhadap pendekatan sebelumnya dengan menempatkan kembali administrasi publik dalam kerangka disiplin utamanya, yakni ilmu politik. Dalam paradigma ini, kajian administrasi negara diarahkan pada birokrasi pemerintahan sebagai lokus utama, sementara penekanan terhadap aspek fokus administrasi dilepaskan. Tujuan utama pendekatan ini adalah memperdalam pemahaman mengenai administrasi negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik secara keseluruhan. Pada fase ini, paradigma ketiga yang memandang administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik memberikan sumbangan signifikan bagi perkembangan kajian administrasi

negara. Pembaruan konseptual juga terjadi dalam penentuan lokus kajian yang tetap berpusat pada birokrasi pemerintah, namun tanpa penekanan pada fokus administratif yang sempit. Ciri utama paradigma ini terletak pada penggunaan pendekatan interdisipliner serta penekanan kuat terhadap konteks politik dalam menganalisis administrasi publik, sehingga terjadi integrasi perspektif ilmu sosial dan ilmu politik dalam memahami praktik dan dinamika administrasi publik.

Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi, 1956- 1970

Dalam perkembangan selanjutnya, administrasi publik mulai diposisikan secara lebih tegas sebagai suatu disiplin ilmu administrasi. Paradigma ini muncul hampir bersamaan dengan paradigma ketiga, ketika administrasi publik kembali ditempatkan dalam kerangka ilmu politik sebagai disiplin induknya, namun dengan penekanan kajian yang berbeda. Pada periode ini, administrasi publik masih memanfaatkan pendekatan ilmu politik, tetapi para pakarnya berupaya memperkuat kedudukannya sebagai ilmu mandiri dengan merumuskan fokus kajian yang jelas. Nicholas Henry menyatakan bahwa suatu disiplin ilmu harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki fokus atau objek kajian tertentu, metodologi yang sistematis, terminologi yang khas, landasan filosofis, serta seperangkat teori yang berkembang secara mandiri. Seiring dengan itu, berbagai teknik manajemen dan teori organisasi mulai dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam kajian administrasi publik, yang dalam praktiknya menuntut tingkat keahlian dan spesialisasi tertentu. Dalam paradigma ini, penetapan fokus kajian menjadi aspek utama yang menentukan identitas ilmu administrasi publik, sementara penentuan lokus atau lokasi kajian tidak lagi dianggap sebagai persyaratan yang esensial.

Paradigma yang Sedang Berkembang 5: Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik, 1970-Sekarang

Paradigma ini menegaskan keberadaan administrasi publik sebagai bidang kajian yang memiliki identitas akademik yang jelas, yang ditandai dengan berdirinya berbagai departemen, fakultas, dan lembaga pendidikan yang secara khusus mengkaji administrasi publik. Perkembangannya mencerminkan adanya dinamika serta perbedaan dalam tujuan, kerangka teori, pendekatan metodologis, dan nilai-nilai dasar yang melandasinya. Dalam kerangka paradigma ini, penekanan utama diletakkan pada penetapan fokus kajian, sementara keberadaan lokus tidak lagi dipandang sebagai syarat yang menentukan. Selain itu, penerapan teknik-teknik ilmu manajemen menjadi unsur penting dalam mendukung penguatan dan pengembangan administrasi publik sebagai disiplin ilmu.

Paradigma 6: Kemunculan Tata Kelola Pemerintahan 1990 – Sekarang

Paradigma keenam dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 1990 dan dikenal dengan konsep *Good Governance*. Paradigma ini dipandang sebagai pendekatan baru yang menjadi karakter penting dalam penyelenggaraan administrasi publik modern. *Good governance* menekankan pentingnya hubungan kemitraan yang setara dan seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*). Konsep ini merepresentasikan pola interaksi yang sinergis, kooperatif, dan konstruktif di antara ketiga aktor tersebut. Penerapan *good governance* mensyaratkan terpenuhinya sejumlah prinsip utama, antara lain partisipasi masyarakat, penegakan hukum (*rule*

of law), keterbukaan informasi, daya tanggap pemerintah, pengambilan keputusan berbasis konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Kehadiran paradigma ini membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan peran administrasi publik, khususnya dalam penggunaan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam perumusan dan implementasi strategi, baik dalam pengelolaan organisasi secara internal maupun dalam hubungan eksternal.

Penelitian mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan termasuk ke dalam paradigma 6 Administrasi Publik (*Good Governance*) karena merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan memberikan akses pendidikan lebih luas. Program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Selatan akan pendidikan berkualitas bertaraf internasional yang dapat diakses oleh siswa dari keluarga pra-sejahtera.

1.7.3 Kebijakan Publik

Aminuddin Bakry (2010) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk keputusan yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan serta distribusi sumber daya, baik sumber daya alam, keuangan, maupun sumber daya manusia, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pengelolaan berbagai sektor tersebut dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan publik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kebijakan yang ditetapkan selanjutnya menjadi acuan bagi para pelaksana dalam menjalankan program, sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat sebagai pihak yang terdampak

oleh kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan publik memiliki dasar legitimasi yang kuat sehingga pelaksanaannya memiliki kekuatan formal dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. Sementara itu, William Dunn (1994) menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang menjadi bagian dari proses politik sekaligus memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan kebijakan. Kegiatan tersebut mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi antaraktor yang terlibat, evaluasi terhadap hasil kebijakan, serta penanganan berbagai permasalahan kebijakan yang muncul. Selanjutnya, Nugroho dalam Wahab (2012:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kebijakan publik lebih menekankan pada tindakan nyata pemerintah dibandingkan sekadar pernyataan kehendak, karena keputusan untuk bertindak maupun tidak bertindak sama-sama menimbulkan konsekuensi kebijakan yang setara.

Berdasarkan berbagai pandangan teoretis, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah atau institusi publik dalam rangka merespons persoalan dan mencapai sasaran tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Kebijakan tersebut tidak hanya berbentuk regulasi, tetapi juga mencakup tindakan dan program yang dirancang untuk memengaruhi serta mengarahkan aktivitas sosial demi terwujudnya tujuan kolektif.

Dalam perspektif Lester dan Stewart, proses kebijakan publik berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, penyempurnaan, hingga tercapainya tujuan kebijakan.

Mengacu pada kerangka tersebut, penelitian ini menitikberatkan analisis pada tahap implementasi.

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:21) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penyaluran output kebijakan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Tahap ini dinilai berhasil apabila hasil kebijakan dimanfaatkan dan diterima oleh kelompok sasaran sehingga memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai keputusan formal yang memiliki legitimasi dan dijalankan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penetapan agenda hingga evaluasi. Seluruh rangkaian tersebut diarahkan untuk mengelola sumber daya secara efektif serta menyelesaikan persoalan publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

1.7.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menempati posisi krusial dalam siklus kebijakan publik, karena kebijakan yang telah diformulasikan tidak akan menghasilkan perubahan apabila tidak diwujudkan secara tepat dalam praktik (Rodiyah et al., 2022). Mazmanian dan Sabatier (dalam Sahya Anggara, 2014:232) menekankan bahwa inti implementasi terletak pada kemampuan memahami serta mengelola konsekuensi yang timbul setelah suatu program ditetapkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Najikhah et al., 2021) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah

maupun pihak nonpemerintah untuk merealisasikan sasaran kebijakan. Pandangan tersebut sejalan dengan Wahab (dalam Andi, 2018:22) yang menyatakan bahwa implementasi mencakup upaya operasional, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, guna mendukung terlaksananya kegiatan sehingga menghasilkan dampak yang diharapkan. Lineberry (dalam Fadillah, 2003:81) juga memandang implementasi sebagai aktivitas pelaksanaan oleh organisasi publik atau swasta, baik secara mandiri maupun kolaboratif, demi mencapai prioritas yang telah direncanakan.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses transformasi keputusan publik ke dalam tindakan operasional melalui koordinasi dan sinergi antar pelaksana. Tahap ini bertujuan memastikan kebijakan berjalan efektif sehingga sasaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1.7.5 Pendekatan Implementasi Kebijakan

a. Pendekatan Top-Down

Pendekatan *top-down* dalam pelaksanaan suatu program menempatkan proses pengambilan keputusan pada tingkat pusat dan dikendalikan oleh aktor-aktor utama di level tersebut. Pendekatan ini menekankan kesesuaian tindakan pelaksana dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam strategi ini, kebijakan yang dirancang secara terpusat dijalankan sesuai arahan otoritas pusat, sehingga aktivitas pelaksana selaras secara konsisten dengan ketentuan dan tujuan yang ditetapkan pembuat kebijakan.

b. Pendekatan dari Bottom-Up

Pendekatan ini berpandangan bahwa proses implementasi kebijakan berawal dari keputusan yang diambil pada tingkat akar rumput, khususnya oleh masyarakat sebagai pihak yang secara langsung mengenali permasalahan yang dihadapi. Agustino (2008:156) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pada dasarnya berlangsung di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat agar pelaksanaannya tetap relevan dan tidak kehilangan efektivitas di masa mendatang. Para pendukung pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya memperhatikan aktor-aktor kunci dalam implementasi kebijakan, terutama birokrat tingkat bawah (*street-level bureaucrats*) serta kelompok sasaran kebijakan (*target group*), karena peran mereka sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Rulinawaty, 2013).

1.7.6 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

1. Model implementasi George C. Edward III

Model implementasi kebijakan George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama yang saling memengaruhi, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi, keempat variabel tersebut adalah:

- a) Komunikasi, menekankan pentingnya penyampaian informasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan dipahami secara seragam oleh pelaksana serta kelompok sasaran agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.

b) Disposisi, berkaitan dengan sikap dan komitmen implementor, seperti integritas, tanggung jawab, dan orientasi demokratis, yang memengaruhi kesungguhan dalam menjalankan kebijakan.

c) Sumber daya, mencakup ketersediaan tenaga yang kompeten dan dukungan anggaran yang memadai sebagai prasyarat efektivitas implementasi.

d) Struktur birokrasi, menegaskan perlunya mekanisme kerja dan hierarki organisasi yang jelas untuk mendukung koordinasi dan pembagian tugas secara efektif.

2. Model Implementasi Merille S. Grindle

Menurut Meriles S. Grindle (dalam Subarsono, 2005) bentuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan dilihat dari 2 aspek, yaitu kandungan dari kebijakan atau *content of policy* dan berkaitan dengan keadaan lokasi pelaksanaan kebijakan atau *context of implementation*. Aspek dari *content of Policy* antara lain:

a. Apakah kebutuhan kelompok sasaran dapat dimasukkan dalam isi program atau kebijakan.

b. Kecukupan posisi program atau kebijakan.

c. Jenis manfaat apa yang diperoleh dari kelompok sasaran.

d. perubahan kebijakan apa yang diharapkan.

e. Sejauh mana ketersediaan sumber daya untuk mendukung program atau kebijakan perlu merinci pelaksanaannya dengan detail.

Variabel context of implementation meliputi:

- a. Karakteristik atau sifat organisasi atau pemimpin yang mempunyai kekuasaan.
- b. Tingkat kepatuhan dan kemampuan menangkap kelompok sasaran.
- c. Tingkat kekuatan, kebutuhan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program atau kebijakan.

3. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Menurut pandangan Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2005:103), keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga variabel utama. Pertama, rasionalitas atau logika kebijakan yang mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut dirancang berdasarkan permasalahan yang jelas, tujuan yang terukur, serta hubungan sebab-akibat yang konsisten. Kedua, kondisi lingkungan tempat kebijakan dijalankan, yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang dapat mendukung ataupun menghambat proses implementasi. Ketiga, kapasitas pelaksana kebijakan, yakni kemampuan aktor atau institusi yang bertanggung jawab dalam merealisasikan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, kapasitas implementor tidak hanya ditentukan oleh aspek struktural, tetapi juga oleh faktor-faktor internal yang melekat pada pelaksana kebijakan. Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja implementor antara lain: (1) tingkat kompetensi atau kemampuan teknis dan manajerial; (2) pemahaman yang memadai terhadap tujuan kebijakan serta mekanisme pelaksanaannya; (3) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia; serta (4) efektivitas komunikasi

dan koordinasi antarunit atau antaraktor yang terlibat dalam proses implementasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan berperan signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

4. Model Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn (dalam Indiahono, 2009), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel utama yang saling berkaitan. Pertama, kejelasan standar dan sasaran kebijakan sebagai tolok ukur pencapaian program. Kedua, kinerja kebijakan yang dinilai berdasarkan tingkat kesesuaian antara hasil pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan.

Ketiga, ketersediaan sumber daya, terutama dukungan finansial dan administratif, yang menunjang proses implementasi. Keempat, efektivitas komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pelaksana. Kelima, karakteristik lembaga pelaksana, termasuk struktur dan budaya birokrasi. Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik sebagai lingkungan eksternal kebijakan. Ketujuh, sikap atau komitmen pelaksana yang turut menentukan konsistensi dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

1.7.7 Model Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward III

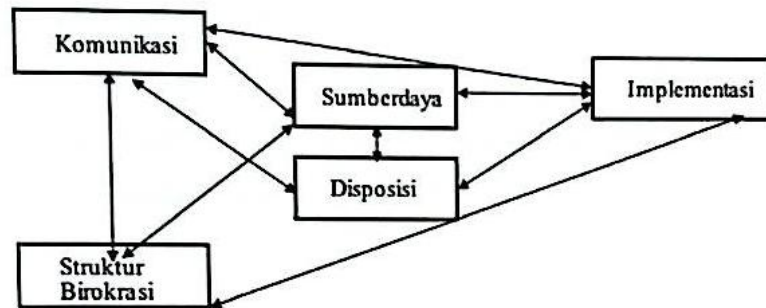
Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu milik George Edward III. Alasan dipilihnya model ini karena terdapat beberapa aspek yang dapat menjawab terkait faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan. Aspek yang sesuai dengan

fenomena penelitiannya, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

Peneliti telah mengidentifikasi dimensi umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan *top-down*, termasuk sumber daya, komunikasi antar organisasi, lingkungan kebijakan dan disposisi pelaksana. Cara ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu program telah mencapai dampak yang maksimal atau sebaliknya. Metode *top down* berfokus pada seberapa baik pelaksana (administrator dan birokrat) mengikuti proses dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Menurut model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagaimana dikutip dalam Syahrudin (2018), tahap implementasi memegang peranan yang sangat krusial dalam keberhasilan kebijakan publik. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik, tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai apabila pelaksanaannya tidak dipersiapkan dan direncanakan secara optimal. Implementasi kebijakan merupakan proses yang bersifat dinamis karena melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi jalannya pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Syahrudin, 2018).

Gambar 1. 6 Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: Edward III (1980:148) dalam Syahrudin (2018)

Subarsono (2011:90) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor kunci, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pihak pengirim kepada pihak penerima. Dalam konteks implementasi kebijakan, penyampaian informasi bertujuan agar para pelaksana kebijakan memahami secara jelas hal-hal yang perlu dipersiapkan serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Peran komunikasi menjadi sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena tingkat pencapaian tujuan sangat bergantung pada sejauh mana para pengambil dan pelaksana keputusan memahami tugas serta tanggung jawabnya. Pemahaman tersebut hanya dapat terwujud melalui mekanisme komunikasi yang berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, setiap keputusan kebijakan maupun ketentuan pelaksanaannya harus

disampaikan secara jelas kepada pihak-pihak yang berwenang melaksanakannya. Selain kejelasan, informasi kebijakan juga harus disampaikan secara tepat, akurat, dan konsisten agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya (Syahrudin, 2018:58).

2. Sumber Daya

Edward III sebagaimana dikutip dalam Syahrudin (2018:60–61) menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Keberhasilan pengelolaan sumber daya dipengaruhi oleh beberapa unsur utama, antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya, Edward III dalam Widodo (2010:98) menjelaskan bahwa implementasi suatu program membutuhkan dukungan berbagai jenis sumber daya, meliputi tenaga manusia, dana, peralatan, serta kewenangan. Sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas dan kuantitas aparatur yang bertugas melaksanakan kebijakan, sedangkan sumber daya keuangan mencerminkan kecukupan anggaran dan pemberian insentif bagi pelaksana tugas. Keterbatasan pada kedua aspek tersebut dapat menurunkan komitmen dan sikap pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya berpotensi menghambat keberhasilan implementasi program. Selain itu, keberadaan peralatan, sarana, dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Di sisi lain, pelaksana kebijakan juga harus dibekali dengan kewenangan yang memadai agar mampu mengambil keputusan sesuai dengan tanggung jawab dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

3. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan, yang mencakup tingkat komitmen, integritas, serta sikap demokratis. Edward menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kondisi di mana para pelaksana memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan kebijakan secara profesional, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau bias tertentu. Sikap implementor menjadi faktor penentu dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan, karena keselarasan pandangan antara pelaksana dan perumus kebijakan akan mendorong pelaksanaan yang penuh semangat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama pada kebijakan yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak aktor, sehingga menuntut adanya kerja sama lintas pihak. Ketidaksiharian antara struktur birokrasi dan kebijakan yang ditetapkan berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya serta menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi dituntut untuk mampu mendukung keputusan politik melalui mekanisme koordinasi yang efektif dan terarah (Syahrudin, 2018:63).

1.7.8 Best Practice

Best practice dimaknai sebagai praktik atau metode yang terbukti berhasil dilaksanakan oleh individu maupun organisasi dan memiliki potensi untuk

diadaptasi oleh pihak lain (Kusuma et al., 2022). Perspektif ini juga sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), yang menyatakan bahwa *best practice* merupakan suatu inisiatif atau program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menunjukkan keberhasilan yang dapat dijadikan dasar pembelajaran dan replikasi (UN-Habitat, 2022).

Menurut UN-Habitat (dalam Prasajo et al., 2004) menegaskan bahwa suatu praktik dapat dikategorikan sebagai *best practice* apabila memenuhi beberapa karakteristik utama, yaitu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terbentuk melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta memiliki keberlanjutan dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan sehingga *best practice* tidak hanya berfokus pada keberhasilan jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan suatu program untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dalam kajian administrasi publik, *best practice* dipandang sebagai metode yang telah terbukti efektif dalam menghasilkan kinerja terbaik dan dapat diadaptasi oleh organisasi lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini juga menyediakan kerangka analisis untuk mengidentifikasi praktik-praktik unggulan yang berkontribusi terhadap keberhasilan suatu program atau kebijakan.

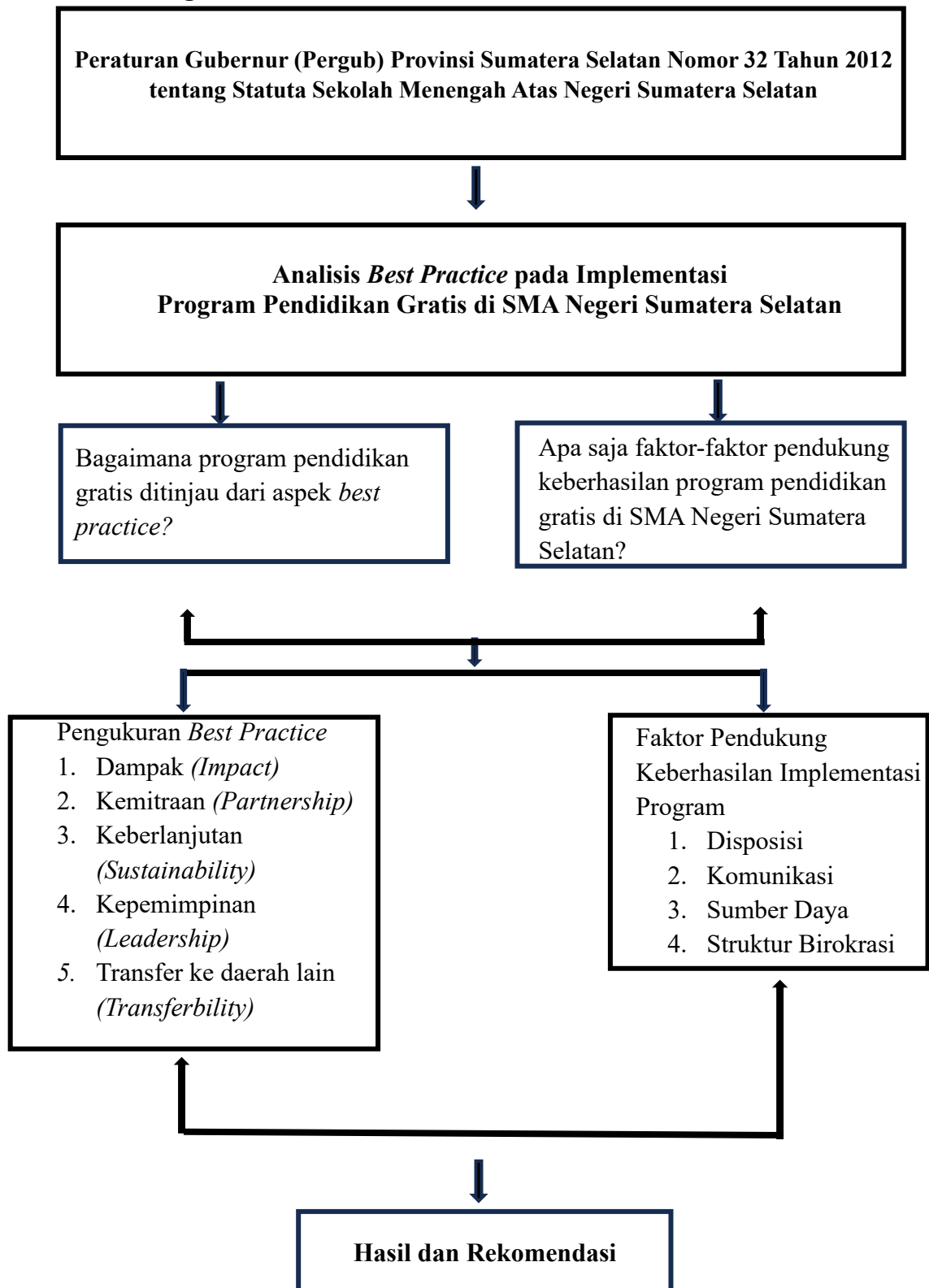
Dalam menganalisis teori *best practice* terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan praktik terbaik yang dilakukan oleh suatu organisasi. Kriteria penilaian *best practice* menurut Prasajo (2007) terdiri dari:

1. Dampak (*impact*), yaitu kemampuan program dalam memberikan perubahan positif yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan sosial dan ekonomi. Dampak tersebut harus bersifat inklusif dan dapat dirasakan secara luas. Dalam bukunya Prasojo (2007) mengatakan bahwa dampak yang bisa dilihat pada dimensi dampak yaitu dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing.
2. Kemitraan (*partnership*), yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan kerja sama antar aktor, setidaknya minimal melibatkan dua pihak yang saling berintegrasi. Prasojo (2007) menjelaskan bahwa pada dimensi kemitraan dilihat dari jumlah stakeholder yang berpartisipasi dan peran atau urgensinya dalam penerapan program.
3. Keberlanjutan (*sustainability*), yang mengacu pada kemampuan program untuk memberikan manfaat jangka panjang. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek pendanaan, tetapi juga mencakup perubahan sistemik, seperti dukungan kebijakan, kerangka kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel dan efisien. Dalam bukunya Prasojo (2007) menjelaskan bahwa dalam dimensi ini, indikator yang digunakan yaitu peraturan atau legislasi yang mendukung keberlanjutan program dan dukungan secara berkelanjutan. Pada indikator legislasi dipecah menjadi bentuk legislasi yang digunakan dalam keberlanjutan inovasi, dan pada indikator dukungan berkelanjutan dipecah menjadi penganggaran yang memihak kepada keberlanjutan program, komitmen dan koordinasi.

4. Kepemimpinan (*leadership*), yang berperan dalam mendorong terjadinya perubahan melalui komitmen dan visi strategis. Kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan lingkungan yang adaptif terhadap inovasi serta mendorong implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Transferabilitas (*transferability*), yaitu kemampuan suatu praktik untuk diadaptasi dan diterapkan di konteks lain diharapkan dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*) bagi wilayah lain melalui proses replikasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Dalam bukunya Prasjojo (2007) menjelaskan bahwa dalam dimensi ini indikator yang dipakai berupa transfer di tempat lain, adopsi pengetahuan/sistem dan adopsi informasi/teknologi, dengan sub indikator berupa kemudahan penerapan program dan fisibilitas untuk diterapkan di tempat lain.

1.7.9 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

1.8 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis secara mendalam mengenai program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan ditinjau dari aspek *best practice* dan menganalisis faktor-faktor pendukung keberhasilan program dengan menggunakan teori dan instrument yang menjadi dasar acuan peneliti.

1.8.1 Best Practice Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera

1. Dampak (*Impact*), Program pendidikan gratis harus memberikan dampak positif dan manfaat nyata pada sisi ekonomi, lingkungan ataupun sosial. Dalam sisi sosial ekonomi memberikan dampak terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya bagi peserta didik berprestasi yang berasal dari keluarga prasejahtera. Fenomena dampak yang akan diteliti, yaitu:

- Dampak kualitas pendidikan
- Dampak langsung yang diterima oleh masyarakat dan kepuasan Masyarakat

2. Kemitraan (*Partnership*) mengkaji keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program dalam menangani permasalahan kemiskinan struktural dan kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena kemitraan yang akan diteliti, yaitu:

- Stakeholder yang terlibat
- Peran stakeholder

3. Keberlanjutan (*Sustainability*) menilai kemampuan program untuk terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang yang ditinjau dari sejauh mana manfaat program dapat dirasakan. Fenomena keberlanjutan yang akan diteliti, yaitu:

- Legislasi

-Pengembangan program

4. Kepemimpinan (*Leadership*), yaitu komitmen pemimpin dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan.

Fenomena kepemimpinan yang akan diteliti, yaitu:

- Komitmen pemimpin

- Dampak kepemimpinan

5. Transferabilitas (*Transferability*), yaitu program pendidikan gratis yang bisa menjadi *lesson learned* bagi daerah lain dan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya. Fenomena transferabilitas yang akan diteliti, yaitu:

-Transfer pengetahuan

1.8.2 Faktor Pendukung Program Pendidikan Gratis SMA Sumatera Selatan

1. Komunikasi

Komunikasi berarti proses penyampaian informasi kebijakan yang mengacu pada proses penyampaian informasi program dari pembuat program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak-pihak pelaksana program sekolah gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan, dan Masyarakat sebagai penerima manfaat. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan,

mekanisme, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan, meliputi:

- a) Kejelasan komunikasi, yaitu komunikasi dan informasi mengenai program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan harus disampaikan secara jelas kepada pelaksana, pembuat kebijakan, dan masyarakat, sehingga tujuan program mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan.
- b) Transmisi, yaitu penyebaran tidak hanya kepada pelaksana, tetapi juga kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dan pihak berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memastikan semua pihak menerima informasi yang sama dan meminimalkan kesalahpahaman.
- c) Konsistensi informasi yang disampaikan, Perintah dan informasi disampaikan secara konsisten agar pelaksana, masyarakat, dan pihak terkait memahami langkah yang harus dijalankan. Konsistensi komunikasi ini penting agar implementasi program berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai.

2) Sumber Daya

Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pengajar di SMA Negeri Sumatera Selatan, dana, sarana-prasarana, informasi, dan wewenang yang memadai untuk mendukung implementasi program, meliputi:

- a) Sumber Daya Manusia mencakup kompetensi, jumlah, dan kualitas tenaga pengajar, kepala sekolah, staf serta peran pemerintah dan Dinas Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Anggaran yaitu sejumlah dana dan ketepatan alokasi dana untuk mengimplementasikan program sekolah gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan. Dalam hal ini, dana yang dialokasikan untuk biaya pendidikan, asrama, konsumsi, tunjangan kesehatan, serta kegiatan pembelajaran siswa.
- c) Informasi meliputi data siswa, mekanisme seleksi, kebutuhan pembelajaran, hingga laporan penggunaan dana. Informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses mendukung proses pengambilan keputusan serta menjamin akuntabilitas pelaksanaan program.
- d) Fasilitas (Sarana dan Prasarana) terkait ketersediaan dan kondisi fasilitas di SMA Negeri Sumatera Selatan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, fasilitas olahraga, dan layanan kesehatan.
- e) Wewenang berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi tercermin pada perilaku dan sikap pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, staf, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam program sekolah gratis. meliputi:

- a) Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, pihak sekolah, guru dan staf yang berkomitmen penuh untuk mendukung siswa dari latar belakang pra-sejahtera agar dapat berprestasi dan berdaya saing tinggi.
- b) Transparansi dan akuntabilitas terkait pelaporan penggunaan dana dan keterbukaan informasi SMA Negeri Sumatera Selatan. Hal ini menciptakan kepercayaan dari masyarakat terhadap program sekolah gratis dan mencegah potensi penyalahgunaan dana.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada sistem organisasi, prosedur, dan koordinasi antar pemerintah provinsi, dinas pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah, dan tenaga pengajar dalam melaksanakan program, meliputi:

- a) SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai pedoman kerja untuk memastikan pelaksanaan program berjalan konsisten dan terarah. Misalnya, prosedur seleksi siswa berprestasi dari keluarga pra-sejahtera, mekanisme pemberian beasiswa, serta sistem pembinaan akademik dan non-akademik di sekolah berasrama.

b) Fragmentasi merujuk pada potensi pembagian kewenangan yang terlalu tersebar ke banyak pihak sehingga dapat memunculkan hambatan komunikasi. Fragmentasi bisa terjadi jika koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan pihak sekolah tidak berjalan baik.

1.8.3 Fenomena Penelitian

| No | Fenomena (1) | Sub Fenomena (2) | Gejala yang Diamati (3) | Informan (4) | Pertanyaan Wawancara (5) |
|----|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1. | <i>Best Practice</i> | Dampak | Dampak terhadap kualitas pendidikan | 1.Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan 2.Guru SMA Negeri Sumatera Selatan | 1.Bagaimana program pendidikan gratis berkontribusi terhadap peningkatan kualitas akademik dan non-akademik peserta didik? 2. Apakah terdapat perubahan dalam capaian pembelajaran siswa sejak program diterapkan? |
| | | | Dampak langsung bagi masyarakat | 1.Orang Tua Siswa | 1. Sejauh mana program ini membantu keluarga dalam mengakses pendidikan berkualitas? |
| | | Kemitraan | Stakeholder yang terlibat | 1. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2.Kepala Bidang Humas SMA Negeri Sumatera Selatan | 1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini? 2. Apakah terdapat dukungan dari pihak luar sekolah dalam pelaksanaan program? |
| | | | Peran stakeholder | 1.Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan | 1. Bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam mendukung keberhasilan program? 2. Bagaimana bentuk koordinasi antara sekolah dengan pihak terkait? |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | Keberlanjutan | Legislasi | 1. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan | 1. Apakah terdapat kebijakan atau regulasi yang menjamin keberlanjutan program ini? |
| | | | Pengembangan program | 1. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan | 1. Bagaimana upaya pengembangan program agar tetap relevan ke depan? |
| | | Kepemimpinan | Komitmen pemimpin | 1. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan | 1. Bagaimana komitmen pimpinan daerah dalam mendukung implementasi program ini? |
| | | | Dampak kepemimpinan | 1. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan | 1. Apa bentuk kepemimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan program Pendidikan gratis? |
| | | Transferabilitas | Transfer pengetahuan | 1. Kepala Bidang Humas SMA Negeri Sumatera Selatan | 1. Apakah terdapat kegiatan transfer pengetahuan terkait program Pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan? |
| 2. | Faktor Pendukung | Komunikasi | Kejelasan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan 3. Guru SMA Negeri Sumatera Selatan 4. Orang Tua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa saja pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan sekolah gratis? 2. Bagaimana pemerintah menjelaskan tujuan program sekolah gratis ini kepada Masyarakat dan Pihak yang terlibat? 3. Bagaimana mekanisme pendataan siswa penerima manfaat dilakukan? 4. Apakah ada tantangan dalam akurasi dan keterbukaan data program (misalnya data keuangan, jumlah siswa, fasilitas)? |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|-----------------------|---|---|
| 2. | | | Transmisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan 3. Wakil Kepala Humas SMA Negeri Sumatera Selatan 4. Wakil Kepala Kurikulum SMA Negeri Sumatera Selatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme sosialisasi program sekolah gratis dilakukan kepada masyarakat? 2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi? 3. Saluran komunikasi apa yang digunakan untuk koordinasi program? 4. Bagaimana mekanisme komunikasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan pemangku kepentingan lain? |
| 3. | | | Konsistensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Kepala Kesiswaan SMA Negeri Sumatera Selatan 2. Guru/Tenaga Pengajar SMA Negeri Sumatera Selatan 3. Wakil Kepala Humas SMA Negeri Sumatera Selatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pernah terjadi perbedaan atau perubahan arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan program? |
| 4. | | Sumber Daya | Sumber Manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan 2. Wakil Kepala Kurikulum SMA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah dan kualitas tenaga pendidik saat ini cukup untuk menunjang pelaksanaan sekolah gratis? |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|--|--|
| | | | | <p>Negeri Sumatera Selatan</p> <p>3. Guru/Tenaga Pengajar SMA Negeri Sumatera Selatan</p> | <p>2. Bagaimana tingkat kompetensi guru?</p> <p>3. Bagaimana ketersediaan tenaga pengajar dalam mendukung kebijakan sekolah gratis?</p> <p>4. Bagaimana strategi meningkatkan kompetensi guru? Apakah ada pelatihan atau dukungan?</p> |
| 5. | | | Anggaran | <p>1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>2. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan</p> <p>3. Wakil Kepala P2M SMA Negeri Sumatera Selatan</p> <p>4. Komite SMA Negeri Sumatera Selatan</p> | <p>1. Darimana sumber anggaran sekolah gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan?</p> <p>2. Berapa banyak dana yang dialokasikan dan bagaimana alokasi anggaran untuk program sekolah gratis ini?</p> <p>3. Bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran program di SMA Negeri Sumatera Selatan?</p> |
| 7. | | | Sarana Prasarana | <p>1. Wakil Kepala Sarana & Prasarana SMA Negeri Sumatera Selatan</p> <p>2. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan</p> | <p>1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana?</p> <p>2. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah saat ini (kelas, asrama, laboratorium, perpustakaan, olahraga, kesehatan)?</p> <p>3. Fasilitas mana yang paling mendukung keberhasilan program?</p> |

| | | | | | |
|-----|--|------------------|---|--|---|
| 8. | | | Wewenang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan 3. Wakil Kepala P2M SMA Negeri Sumatera Selatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana sekolah memiliki kewenangan dalam pengelolaan program? 2. Bagaimana pembagian tugas antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan pihak lain dalam menjalankan program ini? 3. Apakah pihak sekolah diberi wewenang untuk mengelola anggaran atau mengambil keputusan penting terkait pelaksanaan program? |
| 9. | | Disposisi | Sikap & Komitmen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan 2. Wakil Kepala Kurikulum SMA Negeri Sumatera Selatan 3. Guru/Tenaga Pengajar SMA Negeri Sumatera Selatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komitmen kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam mendukung program sekolah gratis ini? 2. Bagaimana menjaga konsistensi implementasi? |
| 10. | | | Transparansi & Akuntabilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan 2. Wakil Kepala P2M SMA Negeri Sumatera Selatan 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini? 2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana? |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| | | | | Olahraga Provinsi Sumatera Selatan | 3. Bagaimana mekanisme pengawasan atau partisipasi masyarakat dalam memastikan akuntabilitas program? |
| 11. | | Struktur Birokrasi | SOP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Kepala Kesiswaan SMA Negeri Sumatera Selatan 2. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan 3. Wakil Kepala Kurikulum SMA Negeri Sumatera Selatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan apa saja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program sekolah gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan 2. Bagaimana SOP seleksi siswa baru dibuat? 3. Apakah ada pedoman kerja (SOP) yang jelas untuk guru dan staf dalam melaksanakan program ini? |
| 12. | | | Fragmentasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2. Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan? 2. Bagaimana pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan dan alur koordinasi sekolah gratis? 3. Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi, dinas pendidikan, dan pihak sekolah dalam melaksanakan program ini? 4. Apakah ada kendala komunikasi atau koordinasi antar lembaga? Bisa berikan contoh? |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

1.9 Argumentasi Penelitian

Argumen penelitian merupakan pernyataan yang disusun berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan secara logis fenomena yang dikaji, sekaligus membantu pembaca memahami urgensi permasalahan yang diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan sebagai suatu *best practice* dalam kebijakan pendidikan daerah dengan menganalisis praktik terbaik menurut Prasajo, mencakup dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transferabilitas, serta faktor pendukung menggunakan teori George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sekolah ini menjadi model pendidikan unggulan di Sumatera Selatan yang menitikberatkan pada pengembangan calon pemimpin dari keluarga kurang mampu, dengan motto "*Learn Today, Lead Tomorrow*".

SMA Negeri Sumatera Selatan adalah sekolah berasrama yang didirikan pada 2009 atas inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation. Sekolah ini bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas internasional bagi siswa pra-sejahtera sebagai strategi pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan. Seluruh siswa menerima beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, dan tunjangan kesehatan, dengan peserta didik dipilih melalui seleksi ketat berdasarkan prestasi akademik dan latar belakang ekonomi keluarga.

Keberhasilan program pendidikan gratis di sekolah ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi

Sumatera Selatan. Rata-rata, IPM meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 71,62 pada 2020 menjadi 73,84 pada 2024. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana praktik baik program pendidikan gratis dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus memberikan perspektif mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi kelompok pra-sejahtera.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji fenomena secara mendalam berdasarkan temuan empiris di lapangan. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan sehingga memunculkan pemahaman yang menyeluruh terhadap realitas sosial. Pendekatan ini dipilih karena analisis dilakukan secara rasional dan sistematis dengan menekankan proses, makna, serta kondisi sosial tertentu (Nawawi, 2007).

Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan fenomena alamiah maupun hasil rekayasa manusia dengan menitikberatkan pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antaraktivitas yang diteliti.

1.10.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dengan mengambil lokus di SMA Negeri Sumatera Selatan sedangkan fokus penelitian tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis ditinjau dari aspek *best practice* yang dilaksanakan oleh SMA Negeri Sumatera Selatan.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berasal dari informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap isu yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi serta relevansinya dengan fokus penelitian agar data yang diperoleh valid dan sesuai kebutuhan kajian.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang selaras dengan tujuan penelitian. Melalui teknik tersebut, informan dipilih karena memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai terkait pelaksanaan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan akurat.

Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan terhadap pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan, antara lain:

| Informan | Alasan Pemilihan Informan |
|--|--|
| Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan | Memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan serta pengawasan pelaksanaan Program Pendidikan Gratis pada tingkat provinsi, sehingga memahami secara menyeluruh mengenai tujuan, regulasi, dan mekanisme implementasi program. |
| Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan | Penanggung jawab utama dalam pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di tingkat sekolah serta memiliki kewenangan. |
| Wakil Kepala Kurikulum SMA Negeri Sumatera Selatan | Memiliki peran dalam pengelolaan kegiatan akademik serta memahami dampak program terhadap proses pembelajaran dan kualitas pendidikan di sekolah. |
| Wakil Kepala Kesiswaan SMA Negeri Sumatera Selatan | Berhubungan langsung dengan pengelolaan peserta didik dan berkaitan langsung dengan program pembinaan dan pengembangan siswa. |
| Wakil Kepala P2M SMA Negeri Sumatera Selatan | Memiliki tanggung jawab dalam menjamin mutu kualitas program, sehingga mengetahui bentuk dukungan program terhadap pengembangan potensi guru dan peserta didik. |
| Wakil Kepala Sarana dan Prasarana SMA Negeri Sumatera Selatan | Memiliki peran dalam pengelolaan fasilitas sekolah yang berkaitan dengan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan Program Pendidikan Gratis. |
| Wakil Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) SMA Negeri Sumatera Selatan | Bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program. |
| Guru/Tenaga Pengajar SMA Negeri Sumatera Selatan | Berinteraksi langsung dengan peserta didik dan dapat memberikan informasi mengenai dampak program terhadap proses pembelajaran serta perkembangan akademik siswa. |
| Orang Tua Peserta Didik SMA Negeri Sumatera Selatan | Merupakan penerima manfaat secara tidak langsung dari Program Pendidikan Gratis dan dapat memberikan perspektif mengenai dampak program terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga serta akses pendidikan anak. |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

1.10.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif dipilih untuk menjelaskan informasi secara mendalam dan terperinci mengenai program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan yang diperoleh dari berbagai informan yang berkompeten dan terpercaya.

1.10.5 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016), sumber data merupakan segala sesuatu yang bernilai informatif bagi kelangsungan yang berkaitan dengan data penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di SMA Negeri Sumatera Selatan, antara lain:

1. Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan informan yang terlibat langsung pada pelaksanaan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan. Peneliti memperoleh data primer melalui informan yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pihak SMA Negeri Sumatera Selatan, serta orang tua peserta didik.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui berbagai macam sumber literature berupa artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, dokumen penting, situs di internet/*website* resmi yang berkaitan dengan program Pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi empiris sesuai tujuan penelitian. Tahap ini bertujuan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga temuan penelitian memiliki keabsahan tinggi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan di kondisi alamiah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua pihak melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi yang dapat dianalisis secara mendalam. Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami secara lebih komprehensif pandangan, pengalaman, serta penafsiran informan terhadap situasi dan fenomena yang diteliti. Wawancara digunakan sebagai instrumen utama pengumpulan data dengan tujuan menggali pemikiran, sikap, perasaan, dan perhatian informan terkait peristiwa maupun aktivitas yang berkaitan dengan budaya organisasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan serta faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian tanpa perantara, dengan tujuan memahami aktivitas yang sedang berlangsung secara nyata. Usman dan Purnomo (dalam Ahyar et al.,

2020:123) menyatakan bahwa observasi merupakan proses pencatatan fenomena penelitian secara sistematis berdasarkan hasil pengamatan. Melalui observasi, peneliti memperoleh data faktual mengenai kondisi sebenarnya di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati pihak pengelola dan penerima program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kebijakan serta capaian yang dihasilkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pencatatan atau penelaahan data yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program pendidikan gratis.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi secara terus-menerus sampai data dianggap cukup. Sugiyono (2015:244) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian dan penyusunan informasi secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Data lapangan yang beragam diringkas dan diseleksi sesuai fokus penelitian. Proses ini bertujuan menekankan informasi yang relevan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami temuan dan menjaga konsistensi dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Data disusun dalam bentuk uraian naratif yang didukung tabel untuk memperjelas temuan, khususnya terkait pelaksanaan program pendidikan gratis dan faktor-faktor pendukung keberhasilannya.

a. Penerikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan penelitian, meskipun sifatnya masih sementara dan dapat berkembang seiring dengan proses pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Dalam penelitian mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan, analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan reduksi dan penyajian data. Tahapan tersebut memudahkan peneliti dalam melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan penelitian secara sistematis dan logis.

1.10.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini difokuskan pada pengujian keabsahan informasi yang diperoleh. Salah satu metode yang digunakan adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:274), triangulasi meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Dalam penelitian ini, validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas SMA Negeri Sumatera Selatan, Triangulasi sumber juga dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru di SMA Negeri Sumatera Selatan. Seluruh data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis secara sistematis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah mengenai pelaksanaan program pendidikan gratis kemudian dikonfirmasi melalui observasi langsung di lingkungan sekolah serta melalui dokumen pendukung seperti data peserta didik, dokumen prestasi sekolah, dan dokumen lain yang terkait dengan program tersebut.